

WAWANCARA TAUFIEQRACHMAN RUKI

Masih Ada Pohon Besar yang Belum Ditebang

Iming-iming suap, uang kontan atau langsung ke rekening ditolak. Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, masih teguh dalam sikapnya yang antisuap.

"Duit saya tidak doyan, fasilitas tidak gua makan, santet juga tidak mempan," kata Ruki tegas.

Baginya, tidak lagi menjadi pimpinan KPK bukan berarti medan pertempuran sudah tertutup. Dia termasuk percaya bahwa lidah, tangan atau hati dengan kemauan kuat dibutuhkan dalam perang melawan korupsi. "Kalau Anda-Anda ini kemampuan memberantas korupsi hanya dengan tulisan, ya tidak apa. *Do it!*" katanya kepada SINDO dalam sebuah wawancara pekan lalu. Berikut ini petikannya.

Anda merasakan beratnya tugas memimpin KPK?

Memimpin KPK saya ibaratkan permainan basket. Ada lima pimpinannya, yaitu kita masing-masing dalam permainan itu bergantian menyerang, maju, mundur. Hanya mungkin saya itu pemain serangan dan pengatur pertahanan. Jadi bahwa ada satu pemain favorit, itu adalah hak penonton untuk menilainya. Tapi yang jelas, seseorang dalam permainan basket itu tidak akan bisa menembak tanpa ada umpan dari kawannya. Apa pun yang saya peroleh, apa pun yang dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah perolehan, itu bukan kerja saya pribadi. Itu adalah sebagai hasil kerja tim yang bernama komisioner pada KPK. Sesungguhnya penghargaan itu diberikan kepada lima pimpinan KPK, berikut semua organisasi pendukung.

Ketika ditunjuk sebagai pengatur pertahanan dan penyerangan, apa yang Anda bayangkan pertama kali?

Surprise. Saya tidak pernah memprediksi akan menjadi ketua. Saya pikir dengan menjadi salah satu pimpinan saja sudah sangat bagus. Dan tentu saja berpikir, sebagai komisioner saya mesti berbuat yang terbaik, sebagai ketua pun saya akan berbuat lebih baik. Kalau bicara kepuasan, saya sendiri pun belum puas karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan saya. Tapi saya mesti mampu mengukur potensi dan kekuatan yang mampu saya gerakkan untuk mencapai sasaran itu. Kalau masyarakat menghendaki saya lari dengan kecepatan 180 km/jam, ibaratnya saya ini pembalap, terus terang saja mobil yang sayaendarai belum bisa mencapai kecepatan 180 km/jam. Tapi saya terus memacu mobil itu secepat mungkin dan sejauh mungkin. Belum puas secara capaian dan belum puas dengan kondisi Indonesia sekarang.

Saat pertama kali ditunjuk, semua berangkat dari nol. Kantor pun belum diberikan. Apa yang Anda susun pertama kali?

Pertama kali menyamakan platform, visi, persepsi antara kita berlima. Apalagi kita berangkat dari latar belakang, pendidikan, dan karakter yang berbeda. Banyak sikap saya berasal dari latar belakang Akademi ABRI. Kemudian dididik dan hidup bergerak di dalam dunia-dunia yang pada awalnya adalah lurus, kemudian masuk dalam pergaulan politik.

Kita menemukan sebuah platform yang sama, yaitu ingin memberantas korupsi di republik ini. Setelah sama, baru merancang strategi, kemudian menyusun kerja sama itu. Setelah itu baru kita pikirkan menyusun kekuatan dan pasukan.

Ujian di tengah perjalanan pasti ada?
Di TNI terdapat pola subjek, objek, dan metode. Objek kita adalah korupsi, maka kita memerlukan sebuah subjek, kekuatan. *Nah* kekuatan itu yang kita susun dulu. Metodenya kita ikuti dengan pola apa mereka bekerja.

Persamaan persepsi, platform, visi, dan misi itulah yang memudahkan kita untuk berjalan. Tinggal persoalannya

adalah kuatkah kita menahan berbagai tekanan, tarikan, dan dorongan? Tekanan politik, tarikan kepentingan, dan dorongan yang tidak baik? Jujur saya akui, iming-iming tidak sedikit, intervensi diikuti iming-iming tidak sedikit. Tolong jangan begini *dong*, ini, ini. Intervensi diikuti dengan ancaman juga tidak sedikit. Paling tidak ancamannya yang bersifat moral.

Ada yang mengatakan bahwa dia punya massa 26.000 yang bisa dikerahkan, saya bilang silakan. Ini membuat kita terus tegar dalam prinsip yang sudah kita gariskan. Godaan-godaan itu berat sekali, tapi karena kita berlima, kita saling mengingatkan. Kalau saya sendiri menjadi Ketua KPK ini, terus terang saya sudah tidak tahu bagaimana nasib KPK ini. Mungkin sudah ambruk.

Apakah untuk menghindari godaan?

Kita semua saling mengingatkan. Kepemimpinan kolektif, sekali lagi kita tidak bisa mengklaim bahwa KPK itu hasil kerja si ini atau itu. Semuanya bekerja dengan baik.

Kalau diibaratkan korupsi di Indonesia seperti hutan rimba, mulai dari mana memberantasnya?

Waktu itu saya katakan kepada teman-teman, sudahlah kita punya apa untuk masuk belantara korupsi ini? Kita hitung. Pisau, punya. Kapak, punya. Parang, punya.

Chainsaw (gergaji mesin), tidak punya. Kita tebang apa yang bisa kita tebang dengan alat yang kita punya. Yang penting kelihatan dulu petanya. Hutan belantara itu kita tidak tahu apa isinya. *Nah*, kalau kita punya *chainsaw*, *gua* tidak peduli. Langsung *dededed* gitu, rata dengan tanah. Tapi sekarang kita tidak punya *chainsaw*, tidak punya pasukan banyak. Kita mau masuk hutan, tapi tidak boleh diterkam harimau, tidak boleh digigit ular. *Yah* sudah kita tebas aja apa yang bisa kita tebas. Saya tahu masih ada pohon besar dalam korupsi itu yang belum kita tebang. Tapi mari kita jujur, punyakah kita kemampuan untuk menebang itu? Sekarang sudah punya, kemarin belum punya.

Artinya Anda merasa sudah punya landasan untuk melangkah ke depan?

Duit sudah ada, personel sudah ada, sistem sudah ada. Tinggal apakah ada larangan kita menebang pohon itu? Ada juga. Ada limitasi. Anda tidak sadar bahwa ada pembatasan dalam UU KPK. KPK itu tidak boleh menyidik korupsi yang tidak ada penyelenggara negaranya, yang tidak ada penegak hukumnya. Pada kasus BLBI dulu, penyelenggara negaranya siapa? Apakah menteri keuangan masa lalu atau itu memang kelakuannya konglomerat hitam? Kalau kelakuan konglomerat hitam, KPK tidak bisa *mejang*. Karena di situ tidak ada penyelenggara negaranya, tidak ada penegak hukumnya. Sebetulnya itu pembatasan yang sangat luar biasa. Belum lagi masanya. BLBI itu jatuhnya pada UU No 3 Tahun 1971, bukan UU No 31 tahun 99. Kalau dia tunduk pada UU No 3 Tahun 1971, maka KPK tidak boleh pegang. KPK bolehnya hanya UU No 31/1999. BLBI kejadiannya *kan* 1995, 1996, 1997. KPK mulai terbentuk tahun 1999, itu hanya boleh menangani kasus yang terjadi sejak 1999. Banyak orang yang setelah dikasih penjelasan itu paham, tetapi *ngomongnya* tetap begitu-begitu.

Soal tuduhan tebang pilih?

Banyak orang yang menghendaki kita menebang BLBI. Tapi UU tidak mengizinkan kita. Mengenai tebang pilih itu sebenarnya bermula dari penanganan kasus DPRD di Sumbar. Terjadi isu tebang pilih karena anggota DPRD dari parpol diajukan ke pengadilan, anggota dari TNI/Polri tidak. Kemudian tebang pilih itu digulirkan terus. *Nah*, inilah yang terjadi. Ada LSM dari sebuah kabupaten lapor ke kita; (lantas) kalau KPK tidak melakukan penangkapan terhadap yang dilaporkan berarti KPK tebang pilih? Memangnya semua perkara ditangani KPK? Memangnya laporan itu pasti akan menjadi masalah? KPK tidak akan membuat orang jadi tersangka hanya karena prasangka. Kita akan bermain dengan yang disebut bukti materi dalam sebuah perkara sidang dan ini tidak gampang.

KPK tidak mempunyai kewenangan menghentikan penyelidikan. Kalau kami sudah menentukan seseorang jadi tersangka, kami akan mengambil segala risiko bahwa orang itu harus dihukum. Dan harus ke pengadilan; kalau ke pengadilan tidak boleh kalah. Siapa pun juga yang diajukan ke pengadilan oleh KPK harus dihukum.

Sebab kalau sampai bebas, KPK ini dianggap tidak profesional. Yang disidik oleh KPK, saya katakan kepada penyelidik-penyelidik itu, tidak boleh bebas. Dalam rangka pembuktian harus hati-hati, jangan sampai ada yang lolos. Kalau ada berkas-berkas yang saya be-

lum puas, saya kembalikan. Daripada bebas, kita malu.

Yang kedua, isu korupsi dijadikan kampanye negatif untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Buktinya apa, setiap kali terjadi, satu tahun atau enam bulan sebelum pilkada, akan banyak sekali laporan-laporan tentang tindak pidana korupsi yang ditunjukkan kepada calon in-

cumbent atau calon lain yang berasal dari luar. Dan setelah pilkada, laporan itu hilang dengan sendirinya. Kalau KPK tidak hati-hati, kemudian terjun memanggul, (itu) sudah akan di-*blow-up* orang. *Wah*, bupati ini diperiksa karena korupsi. Padahal belum tentu.

Itulah, susah buat saya untuk membuat jangan sampai KPK itu tergiring menjadi sebuah alat politik. Ituyang terjadi, bahwa ada orang-orang tertentu yang menggiring KPK menjadi alat politik.

Kalau menjaga hubungan dengan pejabat tinggi yang lain, misalnya kasus Bank Indonesia (BI)?

Sudah ada kesepakatan bersama. Saya dengan Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI) itu teman. Tapi jangan coba-coba dia *dekatin* saya. Kalau *dekatin* saya bisa-bisa dia ditangkap Panggabean (Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan). Karena apa, karena kita berlima. Saya katakan, *sori* (*sorry*, maaf) Pak Burhan, saya tidak bisa mengambil keputusan tentang Anda, karena itu melalui rapat pimpinan.

Saya itu berhubungan baik dengan mereka itu, Widjanarko (Puspoyo) dan segala macam. Jadi kita lempar-lemparan untuk mencegah intervensi.

Kami itu kawannya banyak. Berkawan *kan* tidak boleh negatif. Siapa tahu kawan kita nanti jadi tersangka korupsi? Tapi ketika dia terkait dengan kasus, yang menangani adalah rekan kita, saya tidak boleh. Karena ini mekanisme kepemimpinan yang kolektif, tidak boleh ada yang menonjol satu pun.

Apakah tak mungkin ada friksi di antara kelima pimpinan KPK?

Yah, friksi memang ada. Kalau orang Sunda bilang, piring satu rak saja bisa bontok, ada benturannya *gitu*. Tapi, itu bisa kita selesaikan secara dewasa.

Yang menjadi kepuasan Anda, apakah menjebloskan lebih banyak koruptor? Apa bayangkanya duit yang diselamatkan?

Dua-duanya tidak. Kepuasan saya dalam memimpin KPK ini adalah apabila rakyat sudah merasakan bahwa korupsi sudah berkurang. Caranya bagaimana? Mereka tidak lagi dijadikan perahan saat pengurusan paspor, KTP, tidak ada lagi pungutan liar, tidak lagi kesulitan saat minta izin bangunan. Sekarang *kan* masih begitu praktiknya. Itu sebagai sebuah gambaran, sebagai persepsi masyarakat bahwa masih terjadi korupsi yang banyak di negeri ini.

Bicara soal penegakan hukum di negeri ini, sepertinya masih jauh dari harapan?

Masih jauh dari harapan. Kenapa? Saya betul-betul menyimak kata-kata Prof Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung), (bahwa) pengadilan kita ditelantarkan. Saya ingin mengatakan bahwa hukum itu harus menjadi penyelesai masalah. Kalau ada sengketa, katakanlah pencemaran nama baik, tidak boleh demo. Gugat, ajukan ke pengadilan, hakim nanti yang memutuskan.

Ada perselisihan politik, misalkan pilkada. Yang kalah tidak puas, gugat. Jangan masing-masing mengerahkan pasukannya, berkelahi, tawuran. Hukum harus menjadi penyelesai semua masalah. Hukum harus memberi kepastian. Hukum yang memberikan iklim yang sangat bagus bagi investasi. Itu belum, sampai sekarang. Penegakan hukum kita belum bergerak sangat cepat yang mampu melandasi semua masalah.

Apakah itu karena mafia peradilan? Mafia peradilan itu sebagai sebuah

akibat, mari kita benahi. Polisi, masyarakat, pengacara harus membenahi dirinya. Sudah berapa kali kita buktikan pengacara bermain dalam mafia peradilan? Mereka tidak lagi berperan sebagai pembela, tetapi sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan. Itu bukan kerjaan pengacara, itu mafia. Penyidik, jaksa, dan hakim juga harus membenahi dirinya.

Hakim yang lebih independen, lebih berhati nurani, lebih sejahtera, dan lebih cerdas. Banyak yang harus dibenahi. Kesejahteraan saja masih kurang, kecerdasannya masih kurang, hati nuraninya masih rusak amburadul.

Penegakan hukum adalah urusan yudikatif, bagaimana peran pemerintah atau eksekutif, terutama terhadap pemberantasan korupsi?

Dukungan dari pemerintah ada. Buktinya kami tidak kesulitan mencari pegawai, kami tidak kesulitan mendapatkan gedung, kami tidak kesulitan mendapatkan anggaran. Tidak pernah kami mengajukan anggaran Rp100 miliar dikurangi pemerintah. Artinya mereka secara formal memberikan dukungan. Di negara mana pun, tanpa dukungan eksekutif yang kuat, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil.

Di Singapura, dukungan Lee Kuan Yew terhadap pemberantasan korupsi itu luar biasa. Malaysia, Mahathir Mohammad, itu luar biasa *kencengnya*. Korea, luar biasa, sampai mereka berani mengajukan dua mantan presidennya sebagai tersangka. Di Indonesia, sudah cukup bagus. Mereka tidak pernah intervensi. Yang namanya presiden dan wakil presiden tidak pernah melarang dalam melakukan penyelidikan. Paling mereka menanyakan. Cuma memang masyarakat sudah tidak sabar. Harapan masyarakat cukup tinggi. Ada *gap* antara ekspektasi dengan kemampuan. Kita harusnya lebih cepat lagi.

Artinya eksistensi KPK harus dipertahankan?

Oh, ya. Harus. Pertanyaannya, sudah tercapainya pemberantasan korupsi di Indonesia? Kalau masyarakat *ngomong* belum, jangan bubarkan KPK *dong*. Kalau mereka mengatakan saya tidak mampu, ganti saya. Kalau nanti pemimpin yang baru tidak mampu *ya* ganti. Tapi KPK-nya jangan dibubarkan. Jangan-jangan yang mengusulkan (KPK) dibubarkan itu sebenarnya orang yang takut sama KPK. Mungkin saja itu yang disebut *corruptor fight back*. Saat ini saya melihat itu dengan jelas ada *corruptor fight back*. Sejak awal saya katakan, ada perlawanan balik dari pelaku-pelaku korupsi.

Katanya Anda keras terhadap anak buah?

Kerasnya saya itu bukan dalam artian kasar. Saya ingin sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan.

Ada beberapa kasus belum selesai, sementara KPK sudah berganti pimpinan. Bagaimana itu?

Jadi akan ada catatan khusus untuk pimpinan yang baru. Kasus yang menarik perhatian itu, kasusnya sampai di mana? Nanti perkara ini sudah disidik, yang lain tersangkanya belum ditahan, ini sudah ditahan, saya jawab satu per satu. Jadi semuanya nanti jelas, tidak ada yang tersembunyi.

Tapi apa ada skala prioritas buat pimpinan baru nanti?

Tentunya bukan prioritas *ya*, (tetapi) kasus yang jadi perhatian masyarakat. Misalnya kasus BI, kita berikan catatan khususnya. (*)



Saat ini saya melihat dengan jelas ada *corruptor fight back*. Sejak awal saya katakan, ada perlawanan balik dari pelaku-pelaku korupsi.

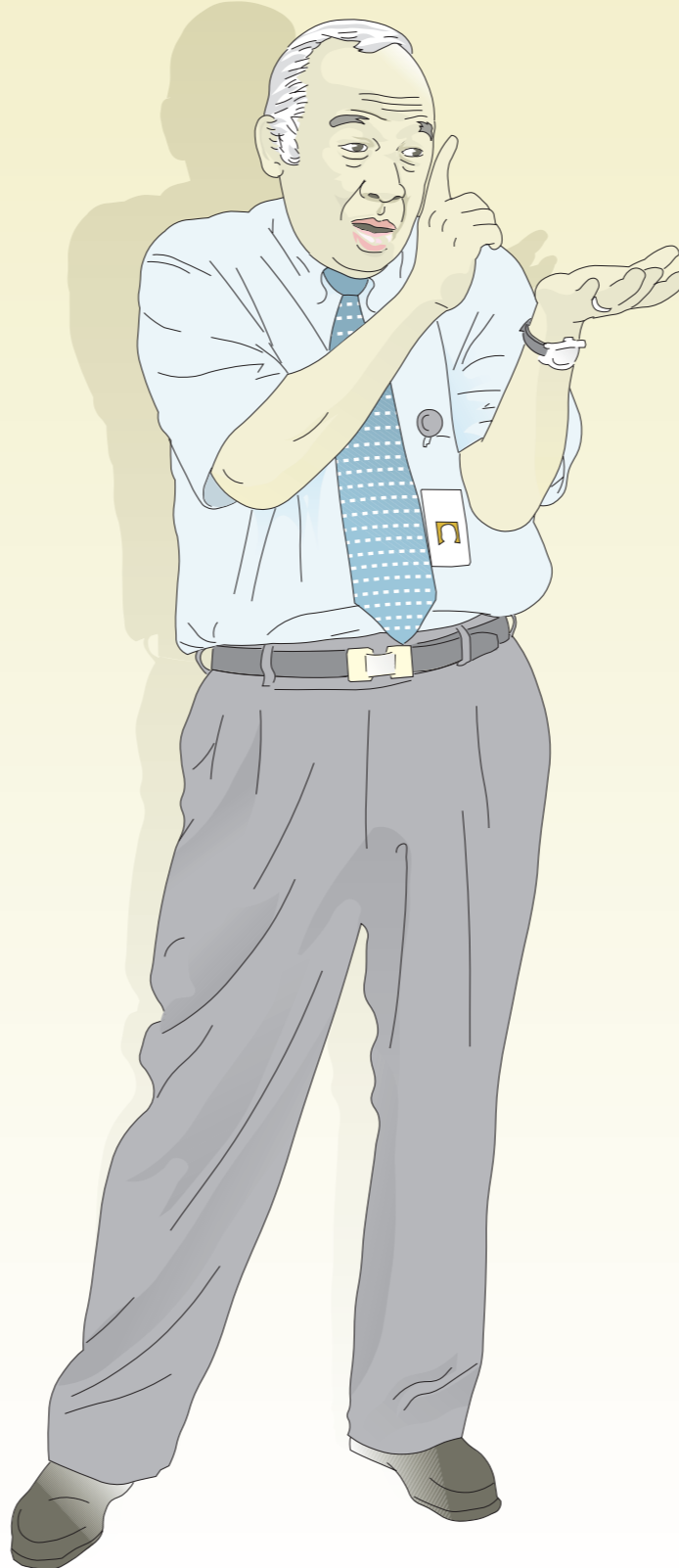
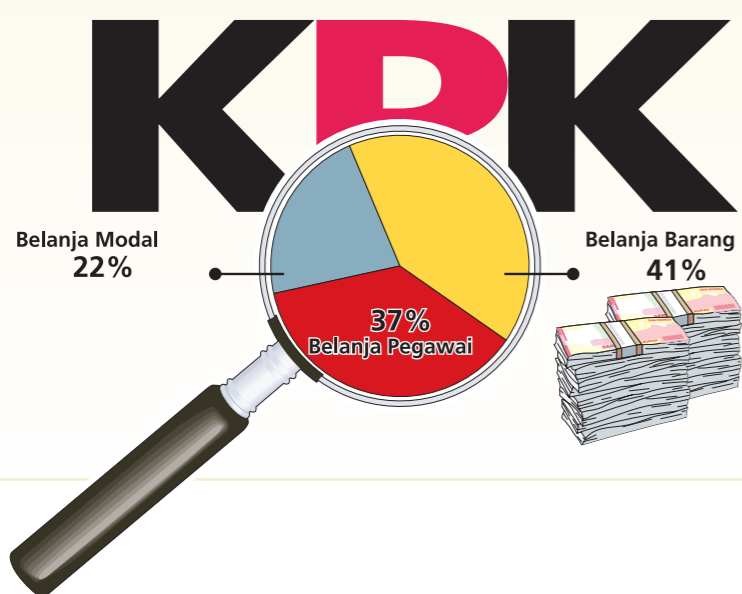


PUNGGAWA PEMBERANTASAN KORUPSI

Memberantas korupsi ibarat menghadapi perang. Sebab, korupsi telah menjadi budaya laten dan menggurita dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga sekarang. Pelbagai tim pemberantasan korupsi sudah berulang kali dibentuk, tapi berulang kali pula lembaga itu tak kuasa melawan korupsi. Sebut saja Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada 1967, Komisi Empat di era 1970-an, termasuk Komisi Antikorupsi yang hanya berusia dua bulan juga pada era 1970-an. Pun begitu dengan Operasi Penertiban yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1982, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang dibentuk berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 dan PP No 19 Tahun 2000, dan terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), semuanya bubar tanpa hasil.

Hingga saat ini pula, formula mujarab untuk memberantas korupsi tak kunjung ditemukan. Belakangan, pada 2003, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan menjadi palang terakhir pemberantasan bahaya laten korupsi. Untuk itu, siapapun yang memimpin lembaga ini dituntut kemampuan fisik dan mental prima. Setidaknya, dia haruslah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sebab, perang memberantas korupsi berdimensi luas, bukan hanya bicara korupsi di masa lalu, tapi juga korupsi masa kini dan korupsi di masa depan. Itu sebabnya, dalam empat tahun terakhir, Taufiequrachman Ruki berupaya memosisikan KPK sebagai katalisator (*trigger*) bagi aparat atau institusi lain. Tujuannya untuk menciptakan *good and clean governance* di negeri ini.

► ALOKASI ANGGARAN KPK TAHUN 2007



Kariernya diawali sebagai perwira kepolisian. Menjabat Komandan Peleton Taruna Akpol (1970–1971). Menjabat Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta (1971–1972). Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang (1972–1974). Menjabat Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang (1974–1975). Menjabat Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung (1975–1979) dan menjadi Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja (1979–1981). Menjabat Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang (1981–1982). Sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982–1984).

Setelah bertugas di Lampung, ditarik menjadi Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri (1984–1985). Mejadi Perwira Staf Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Polri (1985–1986). Diangkat menjabat Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri (1986–1987) dan menjadi Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri (1987–1989).

Menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur (1989–1991) dan pada 1991–1992 menjabat Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Malang (1992–1997).

Anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri (1992–1997). Diangkat kembali tahun 1997–1999 menjadi Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri dan Anggota MPR RI. Pada tahun 1999–2000 juga menjadi Anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra), 1999–2001 Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, 2000–2001 Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKB dan UPW).

Terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada 16 Desember 2003.

Pengalamannya di jajaran kepolisian, Deputi Menko Polkam Bidang Keamanan Nasional, dan 10 tahun (1992–2001) menjadi anggota DPR dipandang sebagai salah satu kelemahan. Independensinya memimpin lembaga yang punya kewenangan besar dalam pemberantasan korupsi banyak diragukan.

Di awal kepemimpinannya, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun kelembagaan dan kapasitas. Untuk merancang struktur organisasi, kode etik, maupun visi misi KPK menyewa 13 orang tenaga ahli. Tugasnya menyusun organisasi, wewenang dan tugas, prosedur, strategi, anggaran, dan kode etik. Pada 26 Januari 2004 sudah finalisasi.

Pada 2007 KPK meningkatkan kinerja dengan peningkatan kualitas dan kegiatan yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Dalam menjalankan program tersebut, pada Tahun Anggaran 2007, KPK mendapat dukungan dana murni APBN sebesar Rp 247.660.200.000 dengan rincian 37% untuk Belanja Pegawai, 41% untuk Belanja Barang, dan 22% untuk Belanja Modal.

Dengan dukungan dana tersebut, kegiatan pemberantasan korupsi tetap dikelompokkan dalam empat bidang utama, yakni:

- Pembangunan Kelembagaan
- Penindakan
- Pencegahan
- Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat

Gladiator Berjiwa Humanis

”Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tapi, kalau (anggota) KPK ‘lewat’ meninggalkan musuh. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan selama empat tahun pertama ini merupakan *stepping stone* (batu pijakan) mencapai hal-hal yang lebih komprehensif lagi ke depan.”

Begitulah sepenggal kalimat yang disampaikan Taufiequrachman Ruki saat serah terima jabatan pimpinan KPK periode 2003–2007 kepada pimpinan baru sepekan lalu.

Acara yang sekaligus menjadi awal perpisahan Ruki—sapaan akrab Taufiequrachman Ruki—dengan profesi yang selama empat tahun ini dia tekuni itu berlangsung dalam suasana sedih bercampur haru.

Sedih karena harus melepas sosok seorang pemimpin yang tegas dan humoris di lembaga yang disebut-sebut sebagai *superbody* ini. Haru karena selama empat tahun pertama masa tugasnya memimpin KPK ini, dia terbilang sukses dan mampu membangun sistem dan struktur lembaga KPK ke depan. KPK di bawah komando Ruki adalah pemberantasan korupsi. Setidaknya, memberikan terapi kejut bagi koruptor.

Sejak awal, pria kelahiran Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946 ini menyadari profesinya bakal mengundang banyak musuh, khususnya para koruptor. Namun pada saat bersamaan, persiapan polisi ini juga sadar bahwa itu bagian risiko pekerjaan yang digelutinya. Menjadi orang yang berdiri di garis depan menegakkan kejahatan korupsi tentu bukan pekerjaan mudah. Apalagi, korupsi menjadi bahaya laten yang menggurita hampir di seluruh strata kehidupan bangsa ini.

Korupsi tidak hanya dilakukan di kalangan pengusaha, tapi mulai dari

rakyat jelata hingga petinggi negara pun diduga pernah melakukan tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) itu. Parahnya lagi, lembaga penegak hukum sebagai tempat masyarakat mencari keadilan pun sudah terkontaminasi.

Tak pelak, untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan lembaga penegak hukum biasa. Perlu eksistensi lembaga independen yang mempunyai wewenang penuh. Keberadaan lembaga khusus seperti KPK secara empiris telah terbukti membantu membebaskan suatu negara dari predikat korup dan perilaku koruptif aparatnya.

Tapi, sejarah juga mencatat, keberadaan lembaga sejenis KPK acap berusia pendek. Ada dugaan, kerap para koruptor yang dekat dengan lingkaran kekuasaan berupaya keras “membunuh” lembaga antikorupsi lewat upaya hukum maupun politik. Sebut saja Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang harus mati lewat *judicial review* di Mahkamah Agung. Begitu pula dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang mati lewat politik legislasi di DPR.

Bagaimana Ruki menghadapi ancaman serupa? Di mata para kolega, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri (1984–1985) ini merupakan sosok pribadi yang ramah, sederhana, dan humoris. Namun di balik itu semua, Ruki juga merupakan pribadi yang tegas, pemberani, dan tidak suka basa-basi.

”Dia itu sosok yang keras, selalu konsisten dengan pendiriannya. Saya berkawan dengan dia sudah puluhan tahun karena sama-sama di kepolisian,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi seraya menambahkan bahwa Ruki juga termasuk pribadi yang sederhana, taat beragama, dan selalu konsisten dengan ucapannya.

Lain lagi pendapat Ketua Pusat Pe-

laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Menurutnya, sosok Ruki yang dikenal selama ini cukup berani. Itu sebabnya, selama periode kepemimpinannya banyak perubahan dan kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. ”Dia berhasil mengubah keadaan. Banyak sekali perbaikan, bukan hanya dalam hal represif. Ada juga yang sifatnya preventif, (semisal) perbaikan sistem (birokrasi) juga sudah mulai,” kata Yunus.

Di samping itu, tambah Yunus, Ruki adalah orang yang suka bicara *blak-blakan* (terus terang). Ruki juga punya komitmen kerja sama yang sangat kuat dengan sesama lembaga pemerintah.

Politisi, Praktisi, dan Akademisi

Keberhasilan Ruki di bidang hukum bukan hanya karena sosoknya yang berani, tetapi juga berhasil mengombinasikan cara berpikir seorang politikus, praktisi, dan akademisi. Mantan Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri (1999–2000) ini juga aktif dalam berbagai seminar, terutama dalam kaitannya dengan masalah hukum dan korupsi.

”Walaupun dia seorang *praktisioner* (praktisi penegakan hukum), dia juga seorang politikus. Semangatnya untuk mendalami hal-hal yang sifatnya keakademisan dan keilmuan sangat tinggi,” ujar Senior Advisor Human Right, Legal & Justice Sector Reform, United Nations Development Programme (UNDP) Mas Achmad Santosa.

Memang, saat dipilih menjadi Ketua KPK periode 2003–2007, awalnya banyak yang meragukan Ruki. Selama menjadi polisi, Ruki dianggap tidak berpengalaman menangani kasus korupsi.

Namun lulusan Akademi Kepolisian (Akp) 1970 ini menjawab keraguan tersebut. Dengan berbagai gebrakan, KPK pun akhirnya berhasil mengungkap beberapa kasus seperti kasus korupsi mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.

Mas Achmad yang merupakan sahabat dan tetangga Ruki menilai, peraih Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama ini sangat bersahaja dan tidak punya ambisi kebumihan (kehidupan duniawi) yang berlebihan. Selain sederhana, Ruki juga tidak suka diperlakukan berlebihan layaknya seorang pejabat negara. Dari dulu, Ruki tidak pernah memiliki ajudan khusus sebagaimana pejabat lain.

”Saya melihat kehidupan keluarganya sangat harmonis dan bersahaja. Saya suka cara berpikirnya yang sangat pragmatis,” ucap Achmad.

Menurut penilaian anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK periode 2007–2011



Dia orang yang konsisten. Sebagai mantan polisi, cara bicarannya juga seperti polisi. Tetapi 50% polisinya itu sudah melebur dalam masyarakat

yang juga pakar manajemen pemasaran, perilaku konsumen, komunikasi, dan strategi Rhenald Kasali, meski banyak yang mengkritik, kinerja KPK selama ini terbilang cukup sukses. Ruki juga sudah berhasil membangun sistem dan struktur KPK, terutama nilai-nilai yang dibangun di lingkup internal, dan cara kerja yang profesional. Hal-hal yang menjadi modal penting pemberantasan korupsi ke depan.

”Dia orang yang konsisten. Sebagai mantan polisi, cara bicarannya juga seperti polisi. Tetapi 50% polisinya itu sudah melebur dalam masyarakat,” kata Rhenald yang juga mengenal Ruki sebagai sosok humanis, ramah terhadap semua orang, dan tidak malu bertanya meski posisinya sebagai pimpinan. ”Jarang sekali sosok yang sifatnya seorang pemimpin, tapi mengajukan pertanyaan,” tambahanya.

Konsentrasi di Yayasan

Kini, Ruki telah menyerahkan tongkat estafet KPK kepada Antasari Azhar. Secara kelembagaan, Ruki telah melepas tanggung jawabnya dari lembaga yang menakutkan bagi koruptor ini. Meski begitu, Ruki mengaku akan tetap mendedikasikan diri untuk meneruskan apa yang sudah dirintisnya. Cuma bentuknya berbeda. ”Nanti saya sesuaikan dengan kondisi fisik,” ungkapnya.

Hingga kini, Ruki mengaku belum memiliki rencana mengisi masa pensiun. Namun ayah dua anak ini menegaskan akan mengisi waktu luangnya di tempat kelahirannya, mengurus Yayasan Amanah Bunda, sebuah wadah semacam balai latihan kerja. Maklum, selama menjabat pimpinan KPK, dia kurang memperhatikan yayasan yang didirikan keluarganya itu.

Yayasan tersebut selama ini cukup banyak membantu masyarakat sekitar untuk mengasah keterampilan. Ruki berharap, pelatihan yang diberikan bisa menjadi bekal masyarakat sekitar mereka ketika hendak mengadu nasib di Ibu Kota. (*)

